



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Cipta milik UIN Suska Riau



ic University of Sult

sim Riau

PENERAPAN KOORDINASI PENANGGULANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN DENGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

SKRIPSI

OLEH :

ALDI DHAFRI
NIM: 11475105792



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S.1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hascipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sult

sim Riau

PENERAPAN KOORDINASI PENANGGULANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN DENGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

ALDI DHAFRI
NIM: 11475105792



PROGRAM STUDI S.1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ALDI DHAFRI
 NIM : 11475105792
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : PENERAPAN KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEBAKARAN HUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP & KEHUTANAN DENGAN BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI RIAU

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Abdiana Ilosa, S.AP. MPA

NIP. 19870716 201503 2 003

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
 Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. H. M. Said HM. M. Ag. MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.sos, M.si
 NIP. 19790101 200710 1 003



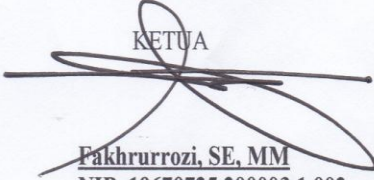
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALDI DHAFRI
NIM : 11475105792
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP & KEHUTANAN DENGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : RABU, 16 JUNI 2021

PANITIA PENGUJI

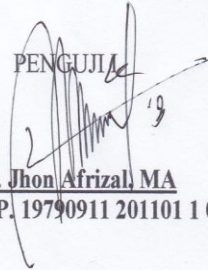
KETUA



Fakhurrozi, SE, MM
NIP. 19670725 200003 1 002


MENGETAHUI

PENGUJI I



Dr. Jhon Afrizal, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI II



Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIK. 130 712 074



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Abstrak

Oleh

Aldi Dhafri

NIM.11475105792

Penelitian di laksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mengetahui Koordinasi dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Terutama Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Data tersebut didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah terkumpul, selanjutnya di analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan Penerapan Koordinasi Penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Kebakaran hutan atau lahan merupakan salah satu sumber penyebab utama perubahan iklim global, sampai sekarang kebakaran hutan di Indonesia belum dapat diatasi secara optimal, disebabkan salah satunya oleh sistem pengorganisasian pengendalian kebakaran hutan atau lahan yang masih lemah. Kebakaran hutan atau lahan sering terjadi pada saat musim kemarau. Kebakaran hutan di Indonesia sendiri sudah sejak lama menjadi bencana tahunan. Angka kebakaran hutan tahun 2015 sangat tinggi dan sampai dengan 2020 tingkat penurunan tidak terlalu signifikan, hal tersebut tentu tidak lepas dari perhatian elemen-elemen yang terlibat dalam menanggulangi kebakaran hutan di provinsi Riau tentunya dalam hal koordinasi antar pihak-pihak tersebut.

Kata Kunci : Penerapan, Koordinasi, penanggulangan, Kebakaran hutan

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayah-nya serta nikmat Islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Penanggualngan Bencana Daerah Provinsi Riau”**.

Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala Saidina Muhammad Wa'ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulallah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses pembuatan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Bu Abdiana Ilosa, S.AP, MPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Seluruh dosen dan pegawai fakultas ekonomi dan ilmu sosial.

Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutan Provinsi Riau dengan Badan Penanggulangan Provinsi Riau, serta seluruh pegawai yang sudah membantu melancarkan penulis dalam melakukan penelitian.

Kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil serta semangat yang luar biasa kepada penulis .

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak

yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT

meridha. Amin yarabbal ‘alamin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Pekanbaru, Mei 2021

Penulis

Aldi Dhafri

NIM. 11475105792

DAFTAR ISI

Hak Cipta
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau

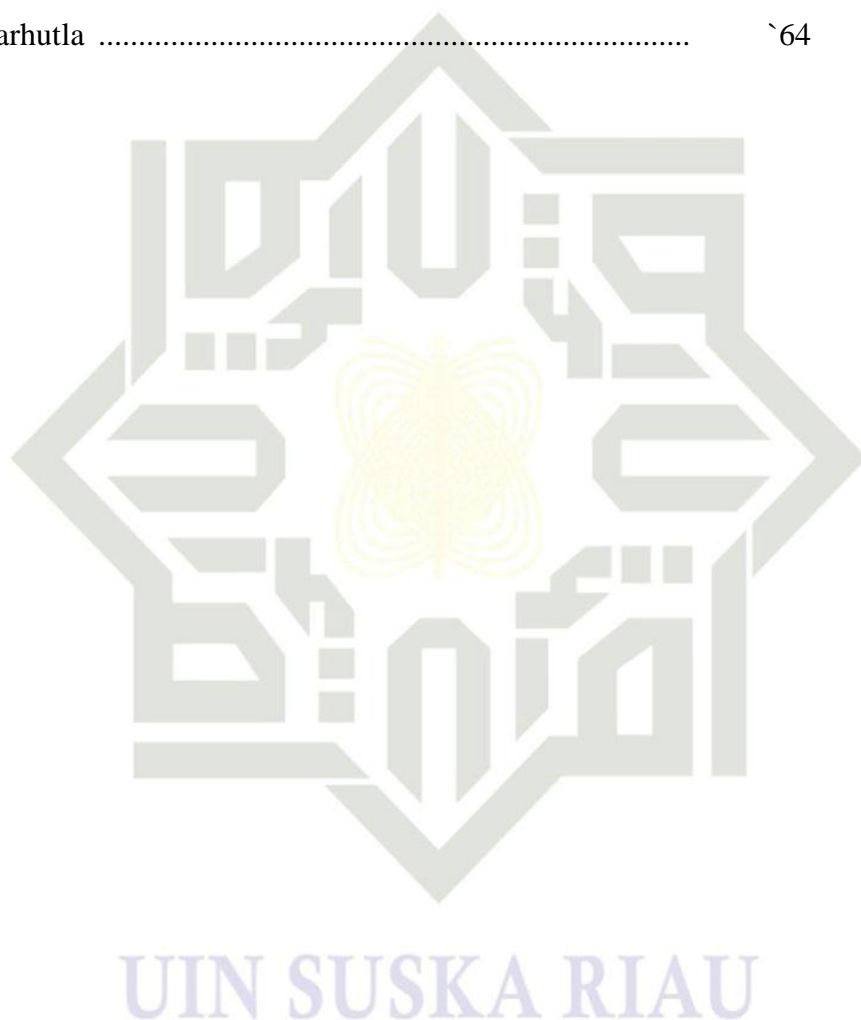
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi.....	15
2.3 Konsep Koordinasi	18
2.3.1 Fungsi Koordinasi	20
2.3.2 Jenis Koordinasi	21
2.3.3 Faktor Penghambat Koordinasi	22
2.3.4 Indikator Koordinasi	23
2.4 Konsep Tentang Kebakaran Hutan	25
2.5 Penyebab Kebakaran Hutan.....	27
2.6 Konsep Pengendalian Kebakaran Hutan.....	27
2.7 DLHK dan BPBD provinsi Riau	30
2.7.1 Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Riau	30
2.7.2 BPBD Provinsi Riau	31
2.8 Pandangan Islam	31
2.9 Definsi Konsep Operasional	34

2.10	Konsep Operasional	35
2.11	Kerangka Berpikir	38
2.12	Penelitian Terdahulu	39
BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3	Jenis dan Sumber Data	40
3.3.1	Data Primer	41
3.3.2	Data Sekunder	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data	41
3.5	Subjek Penelitian	42
3.6	Teknik Analisa Data	42
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1	Gambaran Umum DLHK Provinsi Riau	45
4.2	Visi dan Misi DLHK provinsi Riau	46
4.2.1	Visi DLHK provinsi Riau	46
4.2.2	Misi DLHK provinsi Riau	47
4.2.3	Struktur DLHK provinsi Riau	48
4.3	Gambaran Umum BPBD provinsi Riau	48
4.4	Visi dan Misi BPBD provinsi Riau	52
4.4.1	Visi BPBD provinsi Riau	52
4.4.2	Misi BPBD provinsi Riau	52
4.4.3	Struktur BPBD provinsi Riau	53
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1	Prosedur Koordinasi Kebakaran Hutan	57
5.1.1	Prosedur Penanggulangan kebakaran hutan	57
5.1.2	Pola tata laksana koordinasi	58
5.2	Identitas Responden	59
5.3	Penerapan Koordinasi Penanggulangan kebakaran hutan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan	

DAFTAR GAMBAR

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
Gambar 1.1	Kerangka Berpikir	38
Gambar 4.2.3	Struktur DLHK Provinsi Riau	48
Gambar 4.4.3	StrukturBPBD provinsi Riau	56
Gambar 5.1	Media yang di berikan pihak BPBD di lokasi rawan karhutla	`64



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan atau lahan merupakan salah satu sumber penyebab utama perubahan iklim global, sampai sekarang kebakaran hutan di Indonesia belum dapat diatasi secara optimal, disebabkan salah satunya oleh sistem pengorganisasian pengendalian kebakaran hutan atau lahan yang masih lemah. Kebakaran hutan atau lahan sering terjadi pada saat musim kemarau. Kebakaran hutan di Indonesia sendiri sudah sejak lama menjadi bencana tahunan. Angka kebakaran hutan tahun 2015 sangat tinggi dan mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2016.

Kebakaran yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun tidak disengaja, mulai dari faktor yang disebabkan oleh suhu yang sangat panas saat musim kemarau, dan faktor yang disengaja yaitu pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang berskala besar maupun yang dilakukan oleh masyarakat kecil. Masyarakat membakar lahan untuk membuka lahan pertanian yang baru, karena cara tersebut dianggap cara yang paling mudah dan murah. Pembukaan lahan dengan cara membakar lahan, ataupun faktor alami dari penyebab kebakaran hutan menjadi permasalahan yang sangat serius bagi pemerintah. Kawasan hutan Indonesia belum bisa steril dari kebakaran hutan atau lahan pada saat musim kemarau meskipun angka



kebakarannya mengalami penurunan setiap tahunnya. Peran pemerintah melalui Kementerian maupun dinas terkait yang mengatasi permasalahan lingkungan sangat dibutuhkan guna mengatasi kebakaran, selain peran dari pemerintah tentu peran dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai orang yang paling dekat dengan lingkungan juga harus ikut berperan serta. Penanggulangan kebakaran hutan bukan hanya peran dari pemerintah tetapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Tabel 11. Data Kebakaran Hutan Tahun 2018-2020

Tahun	Perbandingan Jumlah <i>Hotspot</i>	
	Satelit NOAA	Satelit TERRA/AQUA NASSA
2018	21.929	70.971
	82,14%	94,58%
2019	3.915	3.844
	40,25%	53,17%
2020	2.339	1.800

Sumber: <http://www.menlhk.go.id>

Luas area kebakaran dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami tren penurunan yang sangat signifikan. Angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia mengalami penurunan yang sangat tinggi. Hasil tersebut tidak terlepas dari upaya yang serius dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengendalian bencana kebakaran hutan atau lahan. Pemaksimalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tim pemadaman dan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Sebaran titik api banyak terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatera. Luas area kebakaran hutan atau lahan banyak terjadi pada lahan gambut. Sebaran titik api di Sumatera banyak terjadi di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Provinsi Riau menjadi salah satu dengan angka kebakaran hutan atau lahan dalam tingkat yang besar. bila tidak segera diatasi secara serius. Area kebakaran yang banyak terjadi di Riau ada area semak belukar, area lahan gambut dan juga area hutan masyarakat yang akan dibuka guna kepentingan lahan pertanian.

Tabel 1.2. Jumlah Kebakaran lahan (Ha) di Sumatra tahun 2018-2020

NO	Provinsi	Jumlah Kebakaran (Ha)		
		2018	2019	2020
1	Aceh	9.158,45	3.865,16	1.284,70
2	Bengkulu	1.000,39	131,4	8,82
3	Jambi	8.281,25	109,17	1.390,90
4	Lampung	3.201,24	6.177,79	14.963,87
5	Riau	85.219,51	6.866,09	37.220,74
6	Sumatera Barat	2.629,82	2.227,43	2.421,90
7	Sumatera Selatan	8.784,91	3.625,66	13.019,68
8	Sumatra Utara	33.028,62	767,98	3.678,79
9	Kepulauan Riau	67,36	19,61	320,96
	Jumlah	151.371,55	23.791,1	74.310,36

Sumber: SiPONGI Karhutla Monitoring Sistem

Dapat dilihat dari tabel diatas data kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di

1. Provinsi Riau adalah yang terbesar di seluruh sumatera di 3 tahun terakhir ini apabila dibandingkan dengan data kebakaran hutan dengan provinsi lain. Kapabilitas pemerintah Provinsi Riau sangat dituntut dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi dalam dinamika serta perubahan. Kebakaran terus menerus mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan, terlihat dari efeknya yaitu kabut asap. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah tindakan yang baik untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap. Tentu hal ini tidak luput dari dukungan para stakeholder serta masyarakat Riau itu sendiri. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan telah melakukan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap semakin tebal dan mengganggu mobilitas masyarakat, namun kebakaran dan kabut asap tetap muncul kembali. Dengan begitu dalam jumlah kebakaran hutan yang relatif besar, sudah seharusnya kebakaran yang terjadi selalu menimbulkan masalah. Kawasan hutan yang menjadi kawasan yang dilindungi menjadi kawasan yang biasanya terjadi kebakaran. Lahan Gambut dan tanah mineral menjadi salah satu kawasan rawan kebakaran dimusim kemarau. Akibat kebakaran tentu akan menimbulkan dampak kerusakan ekosistem di area kawasan tersebut.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data kebakaran hutan atau lahan tahun 2017 di Provinsi Riau sudah melewati batas toleransi yaitu 85.219,51 hectare, akan tetapi di tahun 2018

jumlahnya menurun pesat menjadi 6.866,09 hectare dan meningkat lagi di tahun 2009 menjadi 37.220,74 hectare. Dinas Kehutanan telah menyikapi masalah tersebut secara optimal dengan memadamkan api kebakaran di berbagai hotspot yang tersebar di seluruh daerah kabupaten di provinsi riau meskipun dalam pelaksanaannya dengan pendanaan yang tidaklah terlalu besar. Menindak lanjuti Peraturan Menteri LHK nomor 32 tahun 2016, Dinas Kehutanan membentuk tim Brigad Karhutla di setiap kawasan yang dianggap rawan kebakaran hutan atau lahan. Selain itu dibentuk posko untuk pemantauan sebaran hotspot melalui web:sipongi.menlhk.go.id/home.

Dikutip wawancara catata merdeka.com mengenai Kebakaran Hutan dan lahan di Riau Jim Gofur mengatakan bahwa:

"Dikutip dari Antara, Jim Gofar menjelaskan upaya pemadaman dilakukan secara simultan melalui tim pemadam dari darat, dan dari udara menggunakan helikopter water bombing dan pesawat untuk teknologi modifikasi cuaca (TMC), "Kebetulan kami dari BPBD Provinsi langsung turun ke lapangan, di Desa Teluk Lancar untuk membantu petugas dari BPBD Bengkalis dan masyarakat peduli api melakukan proses pemadaman. Begitu juga dengan di Kuala Kampar dan Teluk Meranti juga masih dalam proses pemadaman," katanya. Pemprov Riau, kata Jim Gofur. Bantuan dari pemerintah pusat untuk Pemprov Riau yang sudah tiba antara lain tiga helikopter dan dua pesawat untuk penanggulangan Karhutla. Bantuan tersebut berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pesawat Cassa 212 TNI AU kini berada di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) yang bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Satu pesawat lainnya adalah jenis Cessna Caravan yang digunakan untuk keperluan patroli dari BNPB. Kemudian bantuan dari BNPB berupa tiga unit helikopter. Heli tersebut khusus untuk membantu pemadaman kebakaran dengan menjatuhkan air dari udara (water bombing). Sedangkan, satu heli lagi bantuan dari

KLHK digunakan untuk patroli, namun apabila diperlukan bisa membantu pemadaman”. **Sumber:merdeka.com 4 November 2019.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

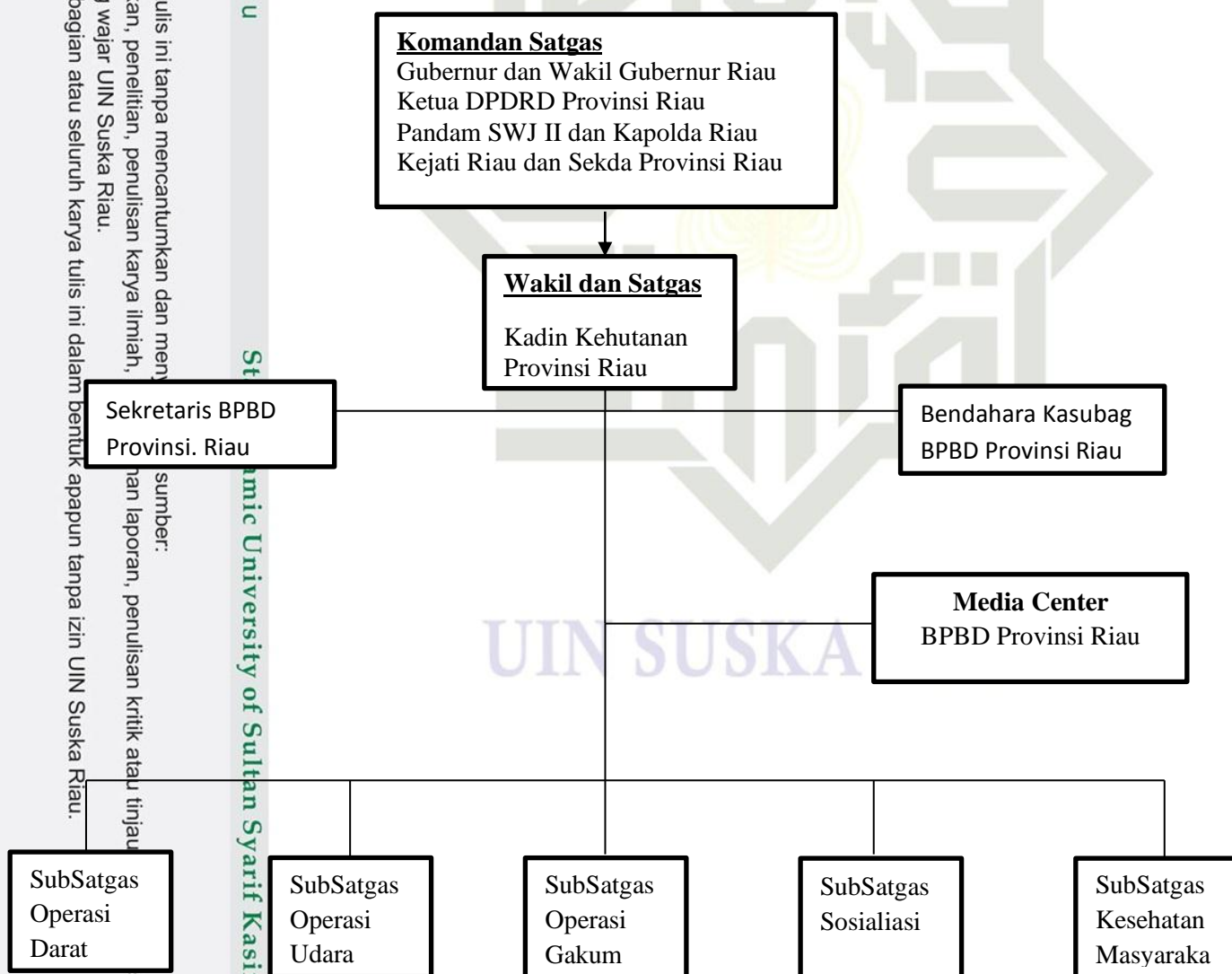
St

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah.

Berdasarkan hasil pra-riset 15 september 2019, pemadaman kebakaran hutan atau lahan di Provinsi Riau dilakukan Pemprov Riau dengan membentuk Satgas Siaga darurat Bencana kebakaran hutan disetiap Kabupaten dapat di lihat di bawah sebagai berikut:

Struktur Koordinasi Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau 2019 adalah sebagai berikut :



Sumber : BPBD Provinsi Riau 2019

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Struktur Koordinasi yang di bentuk oleh pemerintah Daerah Riau dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat bahwasanya pemda sudah membentuk timsatgas yang terstruktur. Oleh sebab Dalam pelaksanaannya penanganan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana kebakaran hutan atau lahan. Pemenuhan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk pemaksimalan penanganan. Selain itu, melakukan kerjasama ataupun pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan perlu dilakukan.

Fungsi BPBD ialah sebagai salah satu badan yang menangani langsung permasalahan bencana yang terjadi. BPBD menganggap dalam kebakaran hutan ini menjadi salah satu bencana, akan tetapi permasalahan kehutanan menjadi tanggung jawab dari Dinas Kehutanan. Gubernur mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan, optimalisasi BPBD dalam pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Riau belum dilakukan. Organisasi pengendalian kebakaran hutan melibatkan banyak instansi atau organisasi pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Pelibatan diantara pihak-pihak tersebut memerlukan suatu hotspot sistem pengorganisasian yang bekerja secara integratif dan harmonis agar efektif dan efisien. Kelemahan pengorganisasian dapat disebabkan oleh faktor antara lain: (1) belum jelasnya peranan dalam pengorganisasian, (2) belum optimalnya hubungan antara organisasi-organisasi yang terlibat dan (3) belum efektifnya organisasi yang terlibat. (Sukrismanto dkk dalam jurnal penelitian hutan dan



tananaman “Hubungan Antar Organisasi Dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan di Indonesia”, 2011).

Dalam pelaksanaannya penanganan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana kebakaran hutan atau lahan. Pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk pemaksimalan penanganan. Selain itu, melakukan kerjasama ataupun pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan perlu dilakukan.

Peneliti memfokuskan pada koordinasi antara Dinas Kehutanan dan BPBD dalam menanggulangi Karhutla. Koordinasi inilah yang menjadi fokus pada penelitian ini dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kehutanan dengan BPBD untuk menekan angka kebakaran hutan yang mengundang kabut asap ini.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

Judul : Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan BPBD Provinsi Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan?

2. Apa Faktor-faktor Penghambat Koordinasi antar Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Bagaimana koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau?

Mengetahui apa saja factor-faktor yang menghambat koordinasi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan?

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang koordinasi penanggulangan kebakaran hutan oleh Dinas Lingkungan Kehutanan Provinsi Riau dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan langkah-langkah untuk melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan oleh Dinas Lingkungan Kehutanan Provinsi Riau dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. Dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Jurusan Administrasi Negara

4. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini agar lebih jelas dan fokus pada permasalahan yang dibahas, maka perlu disusun sistematika penulisan yang tepat. Proposal ini disusun dari berbagai bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I :

PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II :

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang Deskripsi teori, Indikator, Kerangka Pemikiran serta hipotesis.

BAB III :

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data.

BAB IV :

GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian tentang analisis sistem dan prosedur Ombudsman dalam Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian tentang Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan penelitian dan saran dari permasalahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Definsi Kebijakan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.



f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.

h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.

i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.

j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15) istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang birokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan- ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan- aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of*



actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi- konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.



2.2 Implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Kemudian menurut Widodo (Sutojo, 2015:4) mengatakan bahwa, implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses

pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

2.1 Penentu Dilaksanakan atau Tidak Suatu Kebijakan Publik

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara untuk membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah, apakah yang berkenaan dengan kebijakan atau bermacam-macam hal seperti hak paten dan hak duplikasi, membuka perumahan, tarif harga, pencurian malam hari, produksi pertanian, atau penerimaan militer. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrem hasilnya nol.

2.3 Konsep Koordinasi

Handoko (2003: 195-196) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung

pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam pelaksanaannya.

Ndraha (2011:296) koordinasi merupakan sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah, sebagai proses input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Sumber informasi (sender) menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya (receiver). Unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu, atau memberikan feedback kepada sender atau masyarakat.

Sutisna (1989) mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Anonim (2003) mendefinisikan koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan internal antar institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi

Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

3.1 Fungsi koordinasi

Handyaningrat (1982: 119-121) menjelaskan ada beberapa fungsi dari koordinasi:

Kordinasi adalah salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan, dengan perkataan lain bahwa koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai fungsi organik daripada pemimpin memiliki keunikan sendiri bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik lainnya.

Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan (*friction*) yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama diantara komponen-komponen tersebut.

3. Koordinasi adalah merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya

4. Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor dominan, karena bagi kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu, ditentukan oleh kualitas usaha-usaha koordinasi dijalankan.

Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Penataan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan-jaringan kerja atau komunikasi yang diperlukan oleh organisasi, adapun hubungan kerja dan koordinasi, yang sering mengalami hambatan, masalah utama yang perlu mendapat perhatian ialah :

- Pertumbuhan organisasi (*organizational growth*).
- Spesialisasi pada setiap satuan kerja.
- Mementingkan kepentingan satuan kerja (unit), organisasinya.

Pertumbuhan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan. Pertumbuhan ini sekaligus membawa akibat pula penambahan jabatan dan pejabat (orang-orang) yang perlu dikoordinasikan.

7. Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialis ini memainkan peranan yang tidak lepas kaitannya dengan hal hal yang lebih umum dan lebih luas.

2.3.2 Jenis Koordinasi

Handayani (1982: 127-129) menjelaskan bahwa koordinasi memiliki

Hal: Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa model:

Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis, hal ini dapat juga dapat diartikan koordinasi yang bersifat hirarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando.

Koordinasi horisontal, yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat aselonnnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.

Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang koordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando (*line of command*).

3.3 Faktor Penghambat Koordinasi

Handayani (1982: 127-129) dalam pelaksanaan koordinasi, memiliki beberapa hambatan-hambatan:

- Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) Koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiaptiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas, disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta

prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional, Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando), sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

3.4 Indikator Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1982:80), koordinasi dapat diukur melalui indikator:

Komunikasi, Komunikasi menurut Everett M. Rogers dan Laurence Kincaid dalam Wiryanto (2004 :6) komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Proses komunikasi terjadi antara dua orang atau melibatkan beberapa orang dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Waktu dalam berkomunikasi, baik itu jumlah maupun intensitas dapat membentuk sebuah hubungan yang dikenal dengan relationship.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi juga dapat diartikan hubungan atau pertalian. Relationship dapat diartikan sebagai sebuah jalinan hubungan atau interaksi antara dua orang atau lebih disadari dan melibatkan persepsi yang mereka miliki satu sama lain.

Kesadaran pentingnya koordinasi, menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih berkaitan dengan tugas atau kerja para pihak lain. Para pihak biasanya berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana. Sementara itu, kerjasama mengacu kepada praktik antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama kebalikan dari bekerja sendiri-sendiri dan berkompetisi. Motivasi utama dari kerjasama biasanya adalah memperoleh kemanfaatan bersama melalui pembagian tugas, dengan demikian, koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan. Koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan manajemen, dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi dan manajemen akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun terlepas dari peran aktor lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing aktor tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama.

- c.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi partisipan, adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi, dalam hal ini Dinas Kehutanan, BPBD, tim BrigDalkaarhutla, Pemerintah Kecamatan, Kepolisian dan TNI ialah pihak yang harus terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan. Selain itu dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan, dibentuk juga harus melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat diberikan pemahaman dan juga pelatihan tentang penanganan kebakaran hutan atau lahan selain itu untuk pencegahan terjadinya kasus yang sama. Kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam menanggulangi kebakaran hutan atau lahan, haruslah dimiliki semua pihak yang seharusnya terlibat, dengan demikian apa yang menjadi tanggung jawab bersama dapat di laksanakan dengan baik.

Kontinuitas perencanaan adalah kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan, keadaan kontinu. Kontinuitas perencanaan dalam koordinasi adalah menjalankan apa yang sebelumnya telah di rencanakan untuk tercapainya tujuan yang maksimal dari koordinasi, dengan demikian apa sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya feedback umpan balik dari obyek maupun subyek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya.

2.4 Konsep Tentang Kebakaran Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor 32 tahun 2016 kebakaran hutan atau lahan yang selanjutnya disebut (Karhutla) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh



perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Titik panas atau hotspot adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur diatas ambang batas (threshold) tertentu dengan hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan/lahan.

Giglio L. dalam Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2016: 1). Hotspot secara definisi dapat diartikan sebagai daerah yang memiliki suhu permukaan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu yang terpantau oleh satelit penginderaan jauh. Hotspot adalah hasil deteksi kebakaran hutan/lahan pada ukuran piksel tertentu yang kemungkinan terbakar pada saat satelit melintas pada kondisi relatif bebas awan dan biasanya digunakan sebagai indikator atau kebakaran lahan dan hutan di suatu wilayah, sehingga semakin banyak titik hotspot, semakin banyak pula potensi kejadian kebakaran lahan di suatu wilayah.

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api menghancurkan lingkungan hutan atau lahan penyebab utamanya bisa karena manusia ataupun dari alam itu sendiri. Dampak dari terjadinya kebakaran hutan itu sendiri berakibat pada rusaknya ekosistem yang berada di dalam hutan baik ekosistem flora maupun fauna. Akibat terbakarnya hutan atau lahan akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya dan merusak. Asap dari kebakaran hutan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, sebagai penyebab dari timbulnya penyakit pernapasan.

2.5. Penyebab Kebakaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di setiap daerah yang mengalami kebakaran hutan tentu memiliki penyebab yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Akan tetapi pada umumnya secara garis besar penyebab terjadinya kebakaran hutan/lahan menurut Sumardi (2004: 177) ada tiga yaitu Kegiatan Manusia, factor alam dan sebab lainnya. Penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia dipicu adanya aktifitas dari masyarakat. Mulai dari pembukaan lahan pertanian berskala kecil hingga skala besar. Pembakaran hutan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memperluas area perkebunan, seperti perkebunan sawit dan karet. Masyarakat masih banyak yang menganggap pembersihan lahan dengan cara membakar adalah cara yang paling efektif dan efisien. Meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan hal seperti ini yang dianggap sebele bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan kebakaran yang sangat merugikan.

2.6 Konsep Pengendalian Kebakaran Hutan

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016 pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan atau lahan. Upaya pengendalian kebakaran hutan yang sering terjadi di musim kemarau di Indonesia



1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 selain itu juga melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengeluarkan Peraturan Presiden yang terbaru nomor 32 tahun 2016. Setelah itu pemerintah pusat berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Didalam Instruksi Presiden disebutkan dalam pengendalian kebakaran hutan atau lahan bahwa:

Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Sesuai dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016 pasal 71 penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan (karhutla), meliputi:

1. Deteksi dini
2. Pemadaman awal
3. Koordinasi pemadaman
4. Mobilisasi pemadaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemadaman lanjutan

Demobilisasi pemadaman

Evakuasi dan penyelamatan

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan atau lahan (Dalkarhutla), dalam

peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016 pasal

5 sekurang-kurangnya terdiri atas:

Perencanaan

Penyelenggaraan pencegahan

Penyelenggaraan penanggulangan

Penyelenggaraan penanganan pace kebakaran

Koordinasi kerja

Status kesiagaan

Ditingkat pemerintah Provinsi, Gubernur menyusun peraturan mengenai

system pengendalian kebakaran hutan lahan. Mengoptimalkan peran dan fungsi

BPBD sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan atau lahan

dalam APBD Provinsi. Memfasilitasi hubungan kerja antar pemerintah

kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan atau lahan.

Setelah itu melaporkan hasil di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan. Serta mewajibkan pelaku usaha pertanian

memiliki sumberdaya manusia dan juga sarana prasarana dalam penanggulangan

kebakaran hutan atau lahan. Sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan organisasi kebakaran hutan dan lahan pemerintah berfungsi Koordinatif, dan dibentuk oleh menteri. Satuan tugas pengendali kebakaran hutan dan lahan minimal beranggotakan kepala BNPB, menteri agraria dan tata ruang RI, menkes, panglima TNI, kepala kepolisian RI, kepala BMKG, kepala badan geospasial, kepala LAPAN, atau kementerian/lembaga terkait kehutanan. Organisasi pengendalian kebakaran hutan/lahan pemerintah provinsi yang berfungsi koordinatif.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian kebakaran hutan atau lahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim ataupun perseorangan guna mematikan api yang membakar suatu hutan atau lahan dengan menggunakan peralatan pemadam api. Proses pengendalian api tentu cara yang paling efektif adalah pemadaman yang dilakukan dengan tim yang telah profesional. Dengan demikian titik api dapat dipadamkan dengan cepat.

7 Dinas Kehutanan dan BPBD

7.1 Dinas Kehutanan

Dinas sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas sebagaimana dimaksud diklasifikasikan dan dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar, beban kerja yang sedang dan beban kerja yang kecil. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui pejabat daerah. Dinas daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.7.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mempunyai fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.8 Pandangan Islam

Koordinasi berasal dari bahasa latin, yakni cum yang berarti berbeda-beda, dan ordinare yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada

keharusannya. Koordinasi terkadang disebut juga kerjasama, akan tetapi sebenarnya lebih dari pada sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga mengandung sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. bersama. Dengan demikian kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya kerjasama. Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam pencapaian tujuan bersama. Koordinasi merupakan proses yang mengatur pembagian kerja antar individu atau antar kelompok dalam suatu organisasi.

Pokok-pokok pikiran intisari koordinasi, yaitu: Kesatuan tindakan atau usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antar satuan, keselarasan dan sinkronisasi. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan pemberian tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman dalam surah An- Nisa' ayat 58 menyatakan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya



Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. AnNisa', 58)''

Dari ayat ini jelas sekali Allah SWT megisyaratkan untuk senantiasa melaksanakan kordinasi, di mana pada ayat tersebut di gambarkan sebagai penyampaian amanah kepada yang berhak menerima'' seorang atasan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan segala tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan oleh bawahan dengan jalan mengadakan koordinasi yang tujuannya untuk memudahkan tercapainya tujuan yang akan dicapai.

Pendekatan yang dilakukan dalam koordinasi adalah pendekatan sistem. Dengan pendekatan sistem memandang koordinasi sebagai pengintegrasian, mengsinkronisasian, dan penyerderhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah pisah secara terus menerus oleh sejumlah individu atau unit sehingga semuanya bersatu dalam jumlah yang tepat, mutu yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan koordinasi terjadi keseimbangan sejumlah bagian yang berlainan dengan menyelaraskan interaksinya sehingga keseluruhan organisas dalam bergerak kepada satu tujuan yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien sebagai suatu sistem. Koordinasi adalah bagian penting di antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi atau manajemen yang pekerjaannya saling bergantung. Semakin banyak pekerjaan individu-individu atau unit-unit yang berlainan tetapi erat hubungannya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya masalah-masalah koordinasi.

Pembedaan dengan penelitian yang terdahulu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada koordinasi antara Dinas Kehutanan dan BPBD yang belum

berjalan. Penelitian tedahulu melihat hubungan antara lembaga yang berjalan maksimal ditingkat Nasional dan belum maksimal ditingkat daerah. Penelitian ini melihat mengapa koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan BPBD selama ini tidak berjalan efektif. Koordinasi yang tidak berjalan efektif inilah menjadi fokus pada penelitian ini dan apa yang telah di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kehutanan dengan BPBD sehingga angka kebakaran hutan yang mengalami peningkatan di setiap tahun.

2.9 Definisi Konsep Operasional

Definisi Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singer, 2006:33). Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, persepsi atau untuk memudahkan penganalisisan dan menghilangkan keracunan definisi tentang beberapa konsep, untuk menjawab pertanyaan yang akan di teliti, maka penulis memberikan konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengendalian Kebakaran Hutan, Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016 pengendalian kebakaran hutan & lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan atau lahan.diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam pencapaian tujuan bersama. Koordinasi merupakan proses yang mengatur pembagian kerja antar individu atau antar kelompok dalam suatu organisasi.

10 Konsep Operasional

Merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat di ketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa melalui suatu proses atau langkah-langkah.

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dit narik kesimpulannya (Sugiyono,2007:38). Adapun konsep operasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variable	Indikator	Sub indicator
Hak cipta milik UIN Suska Riau Koordinasi Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	1. Komunikasi	1. Membangun Hubungan Komunikatif dengan berbagai media formal maupun informal agar berjalannya program-program yang dilaksanakan antar instansi terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.
	2. Kesadaran Penting nya Koordinasi	1. Kesadaran akan pentingnya koordinasi dengan dua aspek yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi.
	3. Kompetensi Partisipasi	1. Pemahaman tentang komunikasi berlangsung, hubungan peran, informasi yang dimiliki bersama oleh partisipan atau keterlibatan dalam suatu program dalam berbagai tahapan tindakan. 2. Partisipatif mencapai tujuan. 3. Kualitas sumber daya manusia

	berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya.
	4. Kuantitas jumlah sumber daya manusia yang melingkupi seluruh kelompok sasaran.
4. Kontinuitas perencanaan	1. memberikan timbal balik

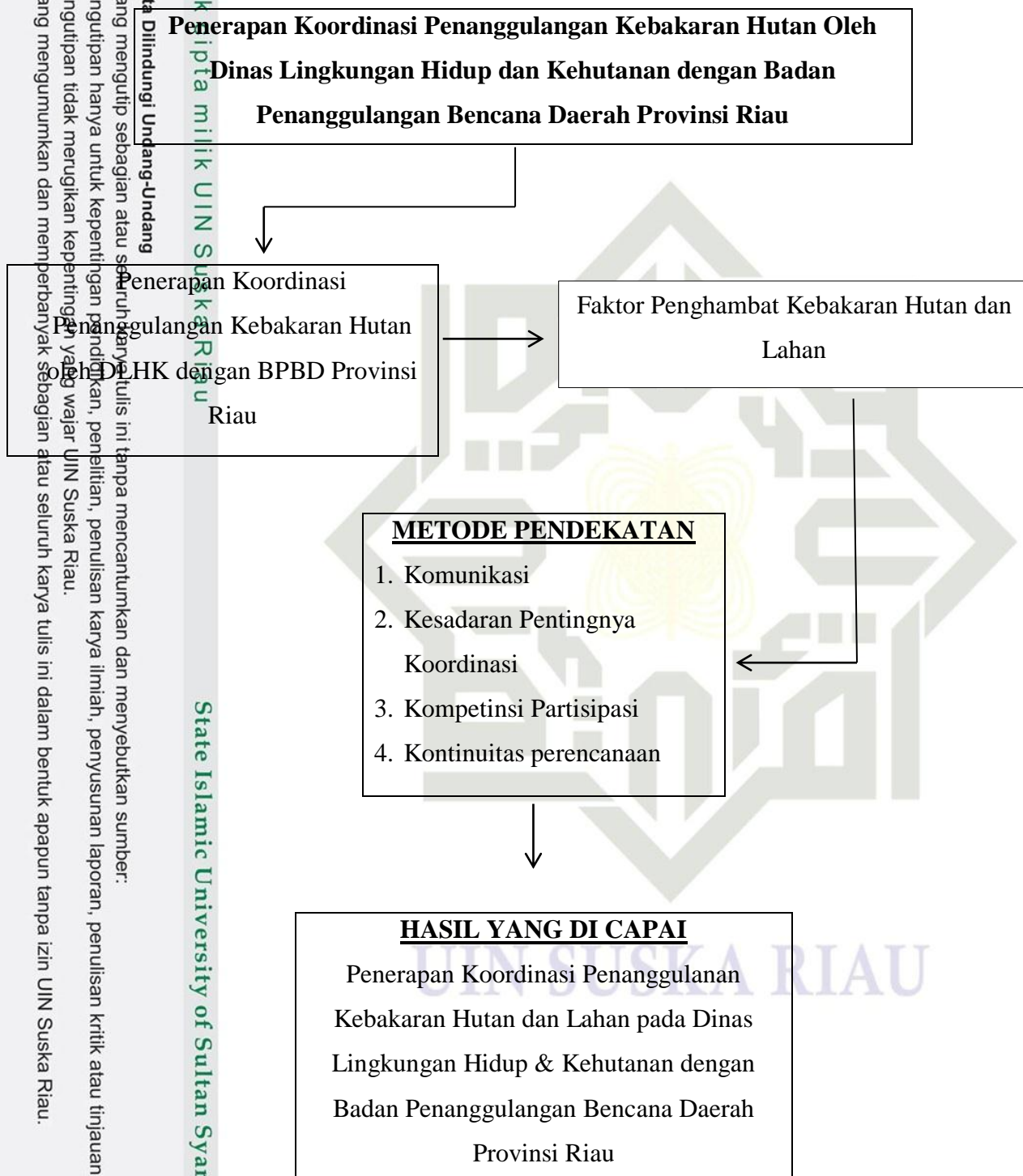
Sumber: Handayani (1982:80)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.11 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1. Dikaji	Erly Sukrismanto Dkk (Jurnal)	Hubungan Antar Organisasi dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan di Indonesia (Jurnal)	Sistem pengorganisasian melibatkan banyak pihak, akan tetapi dalam prakteknya masih kurang. Kondisi yang kurang baik dalam pengorganisasian berimplikasi terhadap penanggulangan kebakaran hutan/lahan yang kurang maksimal.
2. Dikaji	Rr. Mita Ramayati Pratiwi (Skripsi)	Peran Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di KPH Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah	Pemicu terjadinya kebakaran hutan cepu ialah dari kegiatan manusia. Mulai dari tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh para pembalakan liar. Faktor tidak kesengajaan juga yang diakibatkan oleh penggembala yang masuk hutan
3. Dikaji	Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No.2, November 2017 : 165-186	Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan	kebakaran hutan merupakan masalah lintas sektor dan terkait banyak aktor semestinya bukan hanya aktor yang dilibatkan dalam Satgas pengendalian namun juga masyarakat sipil baik NGO, akademisi maupun masyarakat serta pengusaha. Mekanisme koordinasi yang efektif masih perlu dikaji mulai dari pusat, provinsi hingga tingkat desa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan dan prosedur prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016:4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Penerapan koordinasi antara DLHK dengan BPBD provinsi Riau.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yaitu peneliti ingin melihat bagaimana koordinasi antar Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Pekanbaru dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau sebagai fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Karhutla ditingkat Provinsi Riau, dan waktu penelitian dilakuakn pada 5 maret 2020 sampai dengan 8 april 2020

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut



1. Data Primer

Data langsung melalui hasil wawancara dengan informan yang ditentukan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara yang dibuat peneliti sebelum melakukan penelitian secara langsung dilapangan.

Data Sekunder

Data yang peneliti dapat dari pihak ketiga secara tidak langsung, dalam bentuk catatan laporan dokumen melalui instansi terkait, perautan perundang-undangan dan buku-buku yang relevandan literature lainnya.

4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi, sebagai berikut:

Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara penulis dengan informan yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur.

2. Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi penulis mengumpulkan data melalui dokumen, gambar sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara.

3. Observasi

Pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, prosedur



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data yang utama dipakai adalah observasi, khususnya observasi partisipatif yang melibatkan dan wawancara. Peneliti melakukan observasi langsung di Dinas Kehutanan, BPBD, dan Kecamatan yang ada di Pekanbaru tepatnya yang rawan Terjadi Kebakaran.

Subjek Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya pada point dibawah ini:

Tabel 3.1. Data Key Informan penelitian

No	Sub Populasi	Jumlah
1	Kepala DLHK Perwakilan Provinsi Riau	1
2	Kepala BPBD Bidang Penanggulangan Karhutla	1
3	Petugas Pusat Data dan Informasi BPBD Prov. Riau	1
	Jumlah	3

Sumber BPBD dan DLHK Tahun 2020

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu, data yang terkumpul akan secara deskriptif dengan uraian dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan dan tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

Sugiono (2010:24), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah berikut :

Reduksi data, yaitu proses merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan, dianalisis melalui tahapan penjaman informasi, pengolongan berdasarkan kelompoknya, pengaranan atau diarahkan dari arti data tersebut.

- Penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi gambaran adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.
- Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif, namun tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka akan memperoleh kesimpulan yang bersifat “*Grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.
- Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Menjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.
 2. Diutamakan untuk mengemukakan dan memberikan sebanyak mungkin data yang mendukung dan memperkuat kesimpulan yang ditarik.
- Penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi gambaran adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.
- Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif, namun tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka akan memperoleh kesimpulan yang bersifat “*Grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Prov. Riau

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Menurut Simon, perkembangan teori pengelolaan hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern (kehutanan sosial). Yang termasuk ke dalam kehutanan konvensional adalah penambangan kayu atau timber extraction (TE) dan perkebunan kayu atau timber management (TM). Kehutanan Modern/Kehutanan sosial adalah pengelolaan hutan sebagai sumberdaya atau forest resource management (FRM) dan pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau forest ecosystem management (FEM). Keduanya disebut juga dengan istilah lain Sustainable Forestry Management (SFM). Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi, kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu terbentuk alamiah dan buatan. Perkembangan teknologi telah menciptakan teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam. Bumi dengan segala macam di dalam dan di permukaan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.



Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa isu pengelolaan lingkungan telah menjadi satu rumusan tujuan Pembangunan Millenium (millenium development goals/MDGs). Indonesia sebagai pemilik luas hutan tropis terbesar ke-tiga di dunia mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan millenium ini. Sektor kehutanan masuk dalam tujuan pembangunan millenium ketujuh, yaitu “memastikan kelestarian lingkungan”, dimana target ke-berbunyi “memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang”. Pada target tersebut terdapat indikator yang terkait langsung dengan sektor kehutanan, meliputi : (1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan, dan (2) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung dan kawasan konservasi dan hutan rakyat terhadap luas daratan. Maka berdasarkan undang-undang No 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau dan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1958 No 112 , tambahan lembaran negara No.1646) dan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 15 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan berdasarkan persetujuan DPRD Riau, maka resmilah berdiri Dinas kehutanan.

4.2 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau

4.2.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (DLHK) Provinsi Riau

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

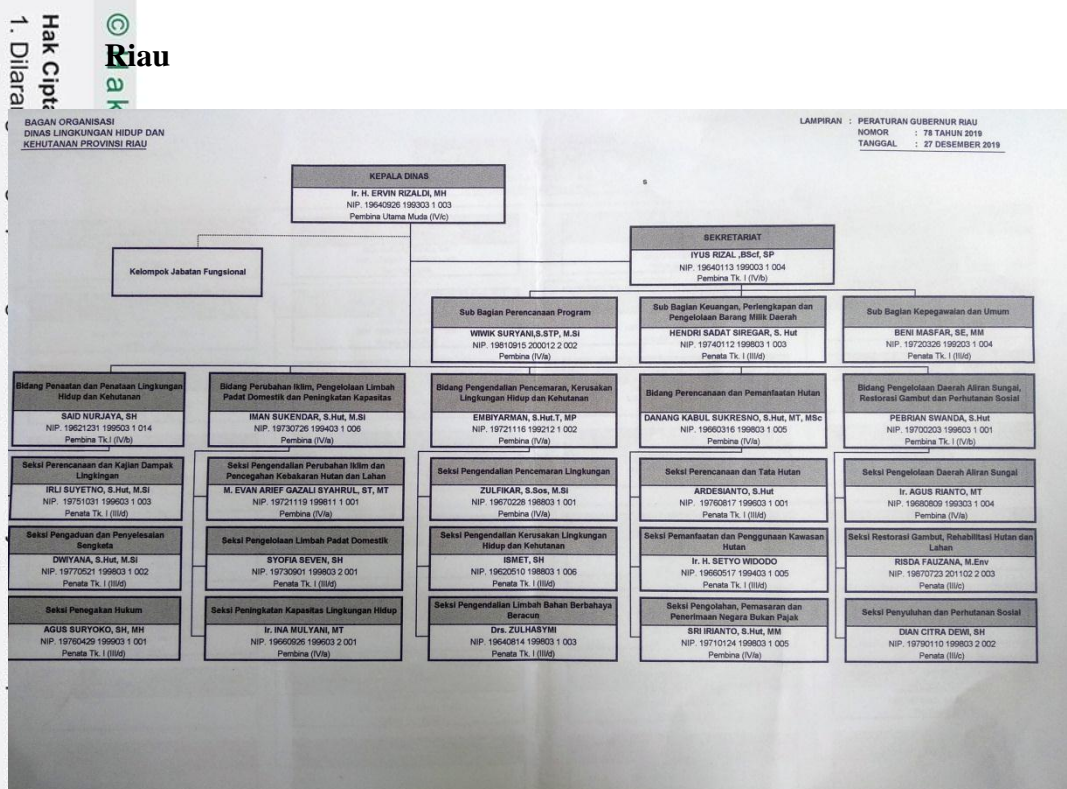
Provinsi Riau yang Lestari untuk Kesejahteraan Rakyat. Makna visi sebagaimana disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup: Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan kehutanan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau secara signifikan pada tahun 2019. Upaya pemulihan ini perlu dibarengi dengan upaya lain yaitu adanya peran serta para pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu. b. Pengelolaan sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari: Pembenahan terhadap komponen-komponen kapasitas pengelolaan sumber daya hutan yang didukung oleh sistem informasi kehutanan dan perencanaan yang handal, hal akan tercermin pada peningkatan persentase lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Riau. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan kehutanan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah, lembaga lingkungan hidup dan kehutanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk mengelola sumber daya hutan yang lestari secara profesional dapat meningkat dalam lima tahun ke depan.

4.2.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (DLHK) Provinsi Riau

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
3. Mewujudkan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kelestarian kawasan hutan tingkat tapak.

4.2.3 Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (DLHK) Provinsi



Sumber: DLHK 2020

4.3 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu organisasi yang berorientasi di bidang Penanggulangan Bencana. Terbentuknya BPBD dimulai pada tahun 2010 atas persetujuan Gubernur Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendapatkan izin dari BNPB pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 pada tanggal 5 Juni 2010, kemudian Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 9 Juni 1992. Atas dasar peraturan diatas maka BPBD dibentuk di Provinsi Riau sebagai upaya koordinasi dan tanggap darurat bencana yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan Provinsi Riau sangat rentan akan bencana terutama

banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Adapun dasar hukum daerah melaksanakan implementasi fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menerangkan mengenai aturan pembangunan desentralisasi pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 membahas mengenai bantuan terhadap peningkatan pembangunan aparatur daerah dan lembaga diatur dalam Pasal 1 ayat 7, meliputi bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelastarian alam.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 74 ayat 1 2 diatur mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat yang menangani bidang penanggulangan bencana, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajaran, ayat 3 mengenai sanksi dan ayat 4 aturan lanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan”.

Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan bencana Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Standarisasi data kebencanaan



5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Cepat dan Tepat Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- b. Prioritas Prioritas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.
- c. Koordinasi dan keterpaduan Koordinasi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- d. Berdaya Guna dan Berhasil Guna. Berdaya guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membunag waktu, tenaga, biaya yang berlebihan. Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, biaya, tenaga dan biaya yang berlebihan. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuha kebutuhan dasar hars dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah bahwa pemberian bantuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

- e. Kemitraan Kemitraan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
- f. Pemberdayaan Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.
- g. Non Diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.
- h. Non Proletisi Non Proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011 tentang uraian tugas badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Riau mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Menyediakan panduan mengenai tanggungjawab sosial kepada semua bantuan organisasi tanpa memperhatikan ukuran lokasi untuk: Prinsip dan isu; menyatukan, melaksanakan memajukan praktek tanggung jawab pemangku kepentingan; mengkomunikasikan komitmen dan performa.

- b. Menyempurnakan/melengkapi Instrumen inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan membantu kegiatan sosial yang dapat membangun rasa kemanusiaan.
- c. Mempromosikan terminologi umum dalam lingkup tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.
- d. Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional standarisasi lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial suatu organisasi.
- e. Prinsip ketaatan pada hukum/legal compliance, prinsip penghormatan instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman.

4.4 Visi dan Misi BPBD Provinsi Riau

4.4.1 Visi BPBD Provinsi Riau

Visi Terwujudnya Provinsi Riau yang tangguh dalam penanggulangan bencana.

4.4.2 Misi BPBD Provinsi Riau

Misi BPBD Provinsi ada 4 yaitu:

1. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana Provinsi Riau.
2. Memperkuat masyarakat berbudaya melayu dengan kualitas layanan aman bencana.



3. Melindungi segenap masyarakat Riau dari dampak bencana.
4. Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana secara terpadu dan berkesinambungan.
- 4.3 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau**
- Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembentukan organisasi dan pendelegasian wewenang serta tugas merupakan unsur utama dan juga merupakan alat untuk mencapai pengawasan yang baik. Pengorganisasian berguna untuk mempersatukan orang-orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan harus ditentukan alat-alat mana yang sesuai, siapa pemegang kunci atau jabatan yang melakukannya dan setiap manajer memiliki wewenang untuk mengatur divisi masing-masing. Struktur organisasi badan mencerminkan kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengadakan pengawasan terhadap manusia, peralatan dan fasilitas lainnya yang terlihat di dalamnya demi tercapainya tujuan. Seorang pimpinan perusahaan harus mempunyai pandangan luas, selain itu pimpinan harus tahu bagaimana mengatur organisasi, dan menentukan bagian-bagian yang tepat untuk diduduki oleh orang yang tepat. Bentuk organisasi yang dianut juga mempengaruhi kebijaksanaan dalam mengorganisir bawahannya, karena itu di dalam menetapkan suatu kebijakan terlebih dahulu harus ditetapkan bentuk organisasi yang akan diterapkan menyesuaikan susunan dan penempatan orang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian terdapat wewenang langsung



antara setiap atasan dan bawahan. Ini berarti bahwa setiap manajer mempunyai wewenang sepenuhnya pada bawahannya, yang melapor hanya pada manajer tersebut atau aliran wewenang langsung dan tidak langsung. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan guna untuk merumuskan suatu organisasi sehingga dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan organisasi yang fleksibel dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri. Unsur-unsur organisasi yang ada di APBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Kepala Badan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Unsur Pengarah

Tugas dan tanggung jawabnya adalah Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah, Pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana .

3. Kepala Pelaksana

Tugas dan tanggung jawabnya adalah Pengkoordinasi dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Penyelenggaraan penanggulangan bencana

4. Sekretariat

Tugas dan tanggung jawabnya adalah Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protocol, Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kedaruratan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic, Pengkoordinasian dan palaksanan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic, Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan

7.

Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau



Sumber: BPBD tahun 2020

Referensi sumber:

- Hak Cipta Biliindologi Undang-1
1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagai
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data data mengenai Penerapan Koordinasi Penanggulangan kebakaran hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Koordinasi Penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah. Hal ini dibuktikan masih marak terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Riau,
2. Faktor hambatan dalam penerapan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dari Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah provinsi Riau diantaranya adalah terbatasnya alokasi dana, fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dari kebakaran hutan atau lahan, kebakaran terjadi dalam skala kecil atau besar serta berada dalam kondisi yang terpencar-pencar (tidak dalam satu hamparan), luasnya kawasan hutan dan lahan serta terpencarnya lahan kosong dan lahan perkebunan masyarakat (nota bene adalah sumber api). Pada umumnya sumber air sangat terbatas, bahkan kering pada lokasi lahan terbakar, dan belum lancarnya koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait dan lintas kabupaten/kota dalam hal kejadian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penanggulangan karhutla khususnya di daerah perbatasan. Dan juga faktor kendala di Kantor Lingkungan Hidup masih rendahnya rasa kepedulian masyarakat pada kawasan untuk memadamkannya secara dini dan melaporkan kejadian karhutla, terutama melaporkan pelaku pembakaran karhutla di daerahnya, dan lokasi karhutla berada pada daerah yang relatif sulit dijangkau karena jauh dari akses jalan

SARAN

Berdasarkan fenomena diatas, Peneliti memberikan Saran seperti perlunya komunikasi sebagai langkah awal koordinasi antara Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Riau, membekali anggota tim pengendalian kebakaran hutan dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai, kampanye dan penyuluhan melalui berbagai aspek juga pengendalian kebakaran hutan dan mengembangkan dan menerapkan bencana pemerintah soal perlindungan, rehabilitasi dan manajemen berkelanjutan tentang hutan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Endrawati, S.Hut. 2016. Analisis Data Titik Panas (Hotspot) dan Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Suyanto dkk. 2004. Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi. CIFOR. Bogor
- Sumardi dan S. M. Widyastuti. 2004. Dasar-dasar Perlindungan Hutan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Wiyafrudin, Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. 2003. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Burhan. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 1997. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar.
- Kountur, Ronny. 2003. Metode Penelitian Kualitatif. PPM. Jakarta.
- Agus, Erwan. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta
- Handayani, Soewarno. 1993. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara. Haji Masagung. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Srikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arifin, Zaenal. 2008. Dasar Penulisan Karya Ilmiah. Grasindo. Jakarta.
- Admugroho, Wahyu Catur dkk. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Gambut. Bogor. Wetland International.

Journal

- Jurnal :**
1. Accep Akbar. 2008. Pengendalian Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat Sebagai Suatu Upaya Mengatasi Risiko Dalam Redd.
 2. Sukrismanto dkk. 2011. Hubungan Antar Organisasi dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan di Indonesia.
 3. Sayendri. 2016. Partisipasi Masyarakat Peduli Api Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013)
 4. Sukarmen. 2017. Faktor Pendukung Dan Peran Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Pada Balai Taman Nasional Way Kambas.
 5. Shahira Harun, Ali Yusri. Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Rokan Hilir Tahun 2010-2013.
- Journal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No.2, November 2017 : 165-186**
- Skripsi :**
1. M. Mita Ramayati Pratiwi. 2007. Peran Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di KPH Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah.
- Website**
- <http://www.menlhk.go.id>

Skripsi :

- Pr. Mita Ramayati Pratiwi. 2007. Peran Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di KPH Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah.

Website:

<http://www.menlhk.go.id>

PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan oleh DLHK dan BPBD provinsi Riau?

Faktor apa yang menghambat koordinasi berjalan?

Bagaimana bentuk komunikasi yang dijalankan oleh pihak DLHK dengan BPBD dalam penanggulangan Karhutla?

Bagaimana Membangkitkan Kesadaran pada tiap individu prihal karhutla di DLHK dan BPBD provinsi Riau?

Bagaimana Proses terbentuknya kompetensi di tiap partisipan penanggulangan Karhutla?

Apa Kontunuitas Perencanaan yang sudah di lakukan oleh DLHK dan BPBD provinsi Riau dalam penanggulangan Karhutla?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

1. H
2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Foto bersama Bapak M. Evan Arief Gazali Syahrul, ST, MT selaku Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan DLHK Prov. Riau



Keterangan: Foto bersama bapak Mitra Adhimukhti, MMSI selaku Kasubbid Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Prov. Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1254/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 02 Maret 2020 M
7 Rajab 1441 H

Kepada
Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

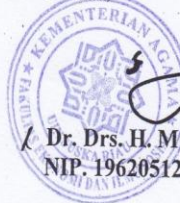
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Aldi Dhafri
NIM : 11475105792
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : XII (Dua Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh/ Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1050/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 13 Februari 2020 M
18 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Aldi Dhafri
NIM. : 11475105792
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : XII (Dua Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Riau" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468
Telepon (0761) - 21630, 31631, 21440 Fax (0761) - 32651
PEKANBARU (28126)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 873.3/Peg-Um/1208

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU, menerangkan bahwa :

N a m a : ALDI DHAFRI
N I M : 11475105792
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara pada UIN Suska Riau

Telah melakukan kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengambilan Data di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk pembuatan dan penyelesaian Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) dengan judul : “ **Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.**


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 08 April 2020

a.n. **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**
SEKRETARIS

Ub

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,


BENI MASFAR, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19720326 199203 1 004

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 438, Telp. (0761) – 855734
 PEKANBARU 28282



SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/BPBD/2020/427

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANDA IHSANUL RIZQI, S.STP, M.Si
 NIP : 19930109 201406 1 001
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I (III/b)
 Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat
 Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang nama tersebut di bawah ini :

Nama : ALDI DHAFRI
 NIM : 11475105792
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Mahasiswa Pada : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL (UIN SUSKA RIAU)

Telah melakukan/melaksanakan Penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau sesuai dengan Surat Izin Pra Riset penelitian penulisan Skripsi Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31739 tanggal 05 Maret 2020 dengan Judul Penelitian : **"PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU."**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI RIAU

Sekretaris

Ub

Kasubbag Kepegawaian dan Umum,

NANDA IHSANUL RIZQI, S.STP, M.Si

Penata Muda Tk. I

NIP. 19930109 201406 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/31739
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1050/2020 Tanggal 5 Maret 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

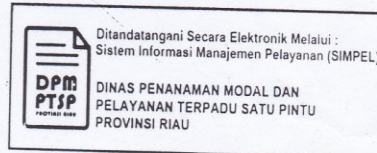
1. Nama : ALDI DHAFRI
2. NIM / KTP : 11475105792
3. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU
7. Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Hak Cipta
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ALDI DHAFRI dilahirkan di Bangkinang, 11 Januari 1997, Penulis beragama Islam, merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Harun dan ibu Farida. Beralamatkan di Jalan Rajawali Sakti Kelurahan Delima Kecamatan Tampan . Riwayat pendidikan penulis yaitu, tamatan tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Tembilahan. Kemudian tamatan tahun 2011 pada jenjang SMPN 1 Tembilahan Hulu. dan tamatan tahun 2014 di jenjang SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) tahun 2014 dengan jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis pun sudah menyelesaikan tugas akhir berupa sebuah Skripsi pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Mutaun & Lahan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.”

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penelitian ini, hanya Doa yang ikhlas untuk kelancaran dalam melakukan penelitian ini serta harus diimbangi dengan usaha dan semangat pantang menyerah, semoga skripsi yang telah ditulis oleh penulis ini dapat memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangNya kepada penulis kedepannya dan orang-orang yang mau berusaha dengan tulus dan ikhlas.

Aamiin Ya Rabbal’ Alamiin